

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka pada tahun 1945, sama halnya seperti negara lain, Indonesia sempat mengalami penjajahan negara asing, Belanda dan Jepang ialah dua negara yang sempat menduduki dan menjajah Indonesia. Periode awal kedatangan dua negara tersebut dimulai dengan datangnya orang-orang Belanda ke Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh rempah-rempah Indonesia. Kedatangan mereka yang nantinya menimbulkan gejolak bagi para pribumi yang sedikit demi sedikit merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada mengikuti apa yang mereka terapkan (Ricklefs, 2008, hlm. 50-51).

Periode kedua ialah periode kedatangan orang-orang Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia dengan kepentingan Jepang bagi Indonesia untuk menyusun dan mengerahkan perekonomian Indonesia dalam rangka untuk menompang upaya perang Negara Jepang dalam kancah perang Dunia. Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan bagi Indonesia. Perubahan-perubahan luar biasa sempat terjadi dan memungkinkan untuk terjadinya Revolusi Indonesia (Ricklefs, 2008, hlm. 421). Namun perubahan-perubahan tersebut tidak bertahan lama karena banyaknya kebijakan yang diterapkan oleh Jepang yang bersifat mengekang bagi Indonesia.

Pada tahun 1945, Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bagi Indonesia. Bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan menjadi unsur yang kuat bagi Indonesia dengan usaha untuk mencari identitas Negara Indonesia sendiri. Masuk pada periode pembentukan Negara Indonesia. Pada tahun 1945 banyak hal menjadi dinamika yang mewarnai perjuangan Negara Indonesia. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Badan ini dipantau ketat oleh orang-orang Jepang dan badan ini bertugas untuk merumuskan dan memusyawarahkan guna mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk Negara Indonesia.

Pada 7 Agustus 1945, diperoleh izin dari Jepang untuk membentuk suatu kepanitiaan yang didalamnya dibentuk oleh orang-orang Indonesia, pembentukan kepanitiaan ini disebut (PPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. (PPKI) ini beranggotakan 21 orang terkemuka yang diantaranya Ir. Sukarno sebagai ketua, Moh. Hatta sebagai wakil ketua, KH. Abdul Wahid Hasyim, R. Otto Iskandar Dinata, Ki Bagoes Hadikoesoma sebagai wakil dari Jawa, dan lainnya sebagai wakil dari Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan (Kahin, 2013, hlm. 180-181).

Dari sekian tokoh-tokoh yang terlibat dalam (PPKI) ada salah satu tokoh yang sedikit banyaknya berperan besar bagi kelangsungan kemerdekaan Indonesia. KH. Abdul Wahid Hasyim ialah salah satu tokoh yang ikut serta berperan dalam kelangsungan kemerdekaan Indonesia. KH. Abdul Wahid Hasyim ialah anak dari Kyai Hasyim Asj'ari tokoh Agamis terkemuka di Indonesia. KH. Abdul Wahid Hasyim lahir pada tahun 1914 di Desa Tebuireng, Jombang Jawa bagian Timur (Aboebakar, 2011, hlm. 157). Kelahiran KH. Abdul Wahid Hasyim sangat ditunggu-tunggu pasalnya keluarga Kyai Hasyim Asj'ari baru pertama mendapatkan anak laki-laki.

Memasuki masa dimana KH. Abdul Wahid Hasyim memulai karirnya. Pada tahun 1938 KH. Abdul Wahid Hasyim mulai ikut serta dalam organisasi yang bernama Nhdlatul Ulama (NU). Akan tetapi pada tahun 1939 KH. Abdul Wahid Hasyim beranjak ikut dalam organisasi yang bernama Majelis Islam A'la Indonesia (MAI). Posisi KH. Abdul Wahid Hasyim dalam (MAI) ialah sebagai ketua (Redaksi Tempo, 2011, hlm. 39).

Peran KH. Abdul Wahid Hasyim tidak hanya dalam organisasi keislaman saja, KH. Abdul Wahid Hasyim ikut serta dalam (BPUPKI) dan (PPKI). Pada tahun 1945 KH. Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu anggota (BPUPKI). lalu pada tahun yang sama juga KH. Abdul Wahid Hasyim ikut dalam (PPKI). Dalam (BPUPKI) KH. Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu wakil dari wilayah Jawa dan yang nantinya berujung pada pembentukan panitia Sembilan yang akan merumuskan dasar Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 45.

Peran KH. Abdul Wahid Hasyim untuk Indonesia terbukti dengan ikut andil dalam (BPUPKI) sebagai anggota dan terlibat didalam panitia sembilan yang menghasilkan "Piagam Jakarta" (Kahin, 2013, hlm. 172).

Agung Syahrman, 2018

PERANAN KH. ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN (1945-1953)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Setelah itu barulah pada tgl 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan disuarakan.

Pada 17 Agustus 1945 ternyata bukan penentu kemerdekaan Indonesia seutuhnya, melainkan kedatangan rezim kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai dan menduduki Indonesia. Agresi militerpun terjadi dan berakhir pada tahun 1950 yang diakhiri oleh “Konferensi Meja Bundar” atau penyerahan kedaulatan sepenuhnya dari Belanda bagi Indonesia (Ricklefs, 2008, hlm. 447). Penyerahan kedaulatan ini menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia memulai. Tatanan pemerintahan Negara Indonesia sedikit demi sedikit mulai berjalan dengan bantuan tokoh-tokoh yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia dan salah satunya KH. Abdul Wahid Hasyim.

KH. Abdul Wahid Hasyim pada masa setelah kemerdekaan Indonesia mengemban amanah menjadi Menteri Negara pada tahun 1945-1949. Setelah itu KH. Abdul Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama RIS pada tahun 1949-1950, lalu berlanjut menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1950-1953 (Aboebakar, 2011, hlm. 683). Hal ini memberikan ketertarikan kepada peneliti untuk mengkaji tentang “peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pemerintahan Indonesia 1945-1953”. Peneliti juga tertarik dengan topik ini mengingat masih ada yang perlu digali dan ditulis menjadi sebuah karya ilmiah tentang K.H Abdul Wahid Hasyim dan juga tentang peranannya dalam sejarah pemerintahan Indonesia. khususnya disaat KH. Abdul Wahid Hasyim menjabat menjadi Menteri.

Alasan peneliti memilih topik pembahasan mengenai KH. Abdul Wahid Hasyim berawal dari peran dan jabatannya sebagai Menteri Agama Indonesia yang pertama, kemudian selain itu peneliti melihat ada sedikit kesenjangan yang dirasa oleh peneliti menarik untuk diperdalam sekaligus dijadikan sebagai bahan penelitian, alasan atau kesenjangan tersebut dilihat oleh peneliti mengenai perannya KH. Abdul Wahid Hasyim yang banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada ranah pendidikan, salah satunya kebijakannya mendirikan PTAIN, IAIN, atau UIN. Hal tersebut lah yang membuat ketertarikan peneliti untuk lebih dalam menggali informasi-informasi mengenai KH. Abdul Wahid Hasyim.

Agung Syahrman, 2018

PERANAN KH. ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN (1945-1953)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Lalu alasan peneliti memilih angka tahun 1945 untuk awal dari kajian penulisan ini. Jelas, karena tahun tersebut awal kemerdekaan Indonesia. Lalu tatanan pemerintahan masih sangat baru dan masih rawan dengan pergolakan politik di internal Indonesia. Mengingat KH. Abdul Wahid Hasyim seorang yang tergolong memiliki andil dalam kemerdekaan Indonesia, peran, posisi, dan kebijakan apa saja yang ada pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim menjabat ditatanan pemerintahan Indonesia.

Kemudian pemilihan angka tahun 1953 ialah sebagai akhir dari kajian ini. Pada 3 April 1952 KH. Abdul Wahid Hasyim turun dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Lalu pada 19 April 1953 KH. Abdul Wahid Hasyim wafat pada usia 39 tahun.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu *“Bagaimana PERANAN K.H ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN (1945-1953)”* ?

Untuk memfokuskan permasalahan yang dikaji lebih jelas dan terarah, maka peneliti memaparkannya dalam beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar belakang kehidupan KH. Abdul Wahid Hasyim ?
2. Bagaimana latar belakang KH. Abdul Wahid Hasyim menjadi Menteri dalam pemerintahan Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan KH. Abdul Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri dalam pemerintahan Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Latar belakang kehidupan KH. Abdul Wahid Hasyim.
2. Menganalisis latar belakang KH. Abdul Wahid Hasyim menjadi Menteri dalam pemerintahan Indonesia.

Agung Syahrman, 2018

PERANAN KH. ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN (1945-1953)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

3. Mendeskripsikan kebijakan KH. Abdul Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri dalam pemerintahan Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti khususnya tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan umumnya memberi wawasan bagi pembaca yang lain mengenai Peranan tokoh KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pemerintahan Indonesia.
2. Memperkaya penelitian sejarah nasional, terutama mengenai peranan tokoh Indonesia.
3. Menambah informasi yang bisa menjadi rujukan dan memberikan kontribusi terhadap mata pelajaran sejarah yang ada di Indonesia.
4. Memperluas pengetahuan mengenai pemerintahan di Indonesia.
5. Menambah sumber rujukan untuk SMA, SMK, atau MAN.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Agar penelitian skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penelitian skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: *Bab I Pendahuluan*. Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, juga mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Pada bab ini, peneliti menjelaskan bagaimana ketertarikan awal peneliti dalam penelitian skripsi ini yang dijelaskan dalam latar belakang. Pembatasan masalah yang akan diteliti oleh peneliti dijelaskan dalam rumusan masalah, dimana dijadikan acuan dalam penelitian skripsi ini agar pembahasan skripsi ini lebih terarah.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisi pemaparan tentang sumber literature yang digunakan peneliti sebagai referensi yang relevan dalam penelitian skripsi ini baik berupa buku ataupun penelitian terdahulu bagi penelitian *Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam pemerintahan Indonesia tahun (1945-1953)*. Pada bab ini peneliti juga mengemukakan teori dan atau beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian skripsi terutama dalam memaparkan pembahasan atau inti dari penelitian skripsi

Agung Syahrman, 2018

PERANAN KH. ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN (1945-1953)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

ini. Teori dan atau konsep yang peneliti gunakan pada bab II ini dijadikan sebagai landasan berfikir peneliti.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai langkah-langkah penelitian, metode, pendekatan dan teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian. Hal ini peneliti gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dalam BAB ini peneliti memaparkan mengenai langkah penelitian dari awal persiapan sampai penelitian berakhir. Tahapan ini meliputi pemilihan topik yang sesuai, mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik, membuat catatan tentang apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung, mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber), menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya, menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya, dan menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas mungkin

Bab IV Pembahasan. Bab IV ini menguraikan hasil penelitian dan memaparkan kajian tentang *Peranan K. H. Abdul Wahid Hasyim dalam pemerintahan Indonesia tahun (1945-1953)*. Dalam BAB ini peneliti mencoba menguraikan jawaban dari rumusan masalah melalui data-data penelitian yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya seperti: Latar belakang kehidupan KH. Abdul Wahid Hasyim, Latar belakang KH. Abdul Wahid Hasyim menjadi Menteri dan Kebijakan-Kebijakan KH. Abdul Wahid Hasyim dari 1945-1953.

Bab V Simpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dan juga inti pembahasan dari bab IV. bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi. Bab V ini juga mengemukakan rekomendasi dari peneliti baik bagi para pembaca ataupun orang-orang, yang diutuju oleh peneliti yang akan mengkaji tentang pembahasan yang berkaitan.

Agung Syahrman, 2018

PERANAN KH. ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN (1945-1953)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu